



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIYADI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEUANGAN
3. NHK : 639913

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **17.742.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 496 m2/420 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.248 m2/1.020 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 8.740.000.000
3. Tanah Seluas 154 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 231.000.000
4. Tanah Seluas 1.403 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 701.500.000
5. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **631.000.000**

1. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, VESPA REGULER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG ZENIX HYBRID Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **323.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.010.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	818.322.990
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	20.524.822.990
III. HUTANG	Rp.	904.936.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	19.619.886.990

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.